



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: II
Rapat	: Ke – 5 (lima)
Jenis Rapat	: Audiensi
Dengan	: DPRD Kabupaten Halmahera Timur
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 14 November 2023
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pimpinan Komisi VII DPR RI
Acara	: Tuntutan Masa Aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk mencabut izin usaha pertambangan PT Priven Lestari
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P.Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Dwiyanti, S.Sos.
Hadir	: A. Pemerintah DPRD Kabupaten Halmahera Timur B. Stakeholder Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato C. 2 Orang Anggota dari 52 Orang Anggota Komisi VII DPR RI terdiri dari: 2 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 50 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Audiensi Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, 14 November 2023 dibuka pukul 13.30 WIB, dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, selaku Ketua Rapat Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Audiensi Komisi VII DPR RI dengan acara Tuntutan Masa Aksi Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato untuk mencabut izin usaha pertambangan PT Priven Lestari

II. CATATAN AUDIENSI

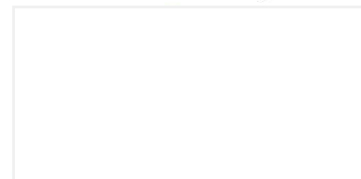
1. Komisi VII DPR RI telah mendengarkan aspirasi dari DPRD Kabupaten Halmahera Timur dan Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato, diantaranya:
 - a. Praktik pembukaan lahan untuk kegiatan operasional pertambangan oleh PT Priven Lestari di Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur yang berdampak buruk kepada lingkungan misalnya menyebabkan banjir di beberapa desa seperti Desa Geltoli.
 - b. Memohon pencabutan izin usaha pertambangan PT Priven Lestari karena mendapat penolakan dari Masyarakat Buli di Lestari di Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur.
 - c. Meningkatkan pengawasan dan tindakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.
 - d. Melakukan evaluasi dampak terhadap perekonomian dan lingkungan dari kegiatan operasional pertambangan dan produksi smelter dari PT Antam Tbk di Kabupaten Halmahera Timur.
2. Komisi VII DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Timur dan Aliansi Peduli Gunung Wato-Wato kepada Kementerian terkait dalam Rapat Komisi VII DPR RI selanjutnya.
3. Komisi VII DPR RI akan mengagendakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Halmahera Timur untuk melihat secara langsung terkait pengelolaan pertambangan nikel di wilayah tersebut.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 15.10 WIB

Jakarta, 14 November 2023

KETUA RAPAT,



SUGENG SUPARWOTO
A-373